



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Kamis 05 Desember 2024



## RINGKASAN BERITA HARI INI

### Usman Lapor Badan Kehormatan DPRD Sidoarjo

by cakrajatim — 4 Desember 2024



Cakra jatim.com – Sidoarjo: Anggota Banggar dari fraksi PKB, H. Usman, mendatangi kantor BK (Badan Kehormatan) DPRD untuk menyerahkan dokumen dugaan kesalahan mekanisme dalam proses persetujuan RAPBD Sidoarjo 2025.

Dugaan kesalahan itu ditemukannya terkait pembahasan terakhir menjelang pembahasan terakhir APBD 2025, Sabtu (30/11) lalu.

RELATED POSTS

### Penghapusan Dana Hibah Bagi Tiga Ormas Diduga Cacat Prosedur. H Usman Laporkan Ke BK

dimensinews | 04 Desember 2024, 10:01 am | 0 comments | 96 views



Anggota DPRD Sidoarjo dari F\_PKB H.Usman M Kes saat menyerahkan sejumlah dokumen terkait hasil keputusan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo kepada Ketua BK Dr H Emir Firdaus ST MM.

Bangun Winarso, Anggota DPRD dari PAN yang juga salah Satu Anggota Banggar.

DIMENSINEWS.COM SIDOARJO; Khabar tentang dihapusnya plafon anggaran/dana hibah bagi tiga organisasi masyarakat (Ormas)

### SIREKAP Permudah Proses Rekapitulasi Suara

SIDOARJO - Jadwal Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pilkada 2024 tingkat Kabupaten Sidoarjo direncanakan besok Kamis, (5/12/24). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo kembali menggunakan aplikasi SIREKAP sebagai alat bantu rekapitulasi suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.



Komisiner KPU Sidoarjo Muhammad Natsiruddin Yahya, (7/12/2024)

Aplikasi SIREKAP terdiri dari dua platform utama, yaitu SIREKAP Mobile berbasis Android dan SIREKAP Web. SIREKAP Mobile digunakan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memotret formulir C.

Hasil dan mengirimkan data tersebut ke server setelah divalidasi. Data yang terkumpul dari setiap TPS kemudian diproses lebih lanjut menggunakan SIREKAP Web oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, hingga KPU Provinsi untuk rekapitulasi di masing-masing tingkatan.

"Penguasaan SIREKAP sebagai alat bantu rekapitulasi suara membuat proses rekapitulasi berjalan cepat," ujar Natsiruddin Yahya, Komisiner KPU Kabupaten Sidoarjo Divisi Data dan Informasi, kepada Duta Masyarakat, Rabu (4/12/24).

"Perbaruan versi SIREKAP meningkatkan akurasi data dan mengurangi potensi kesalahan pada pencatatan manual," tambahnya.

Masih kata Natsiruddin Yahya, menambahkan, implementasi SIREKAP Mobile dimulai di TPS di mana petugas KPPS memfoto hasil penghitungan suara C Hasil menggunakan aplikasi sirekap, sehingga dapat tampil dalam sirekap web yang di monitoring langsung secara berjenjang oleh PPK, KPU Kabupaten, hingga KPU RI.

"Alhamdulillah Aplikasi sirekap saat pilkada ini berjalan lancar, Proses unggah data dari sirekap

mobile tidak sampai 24 jam, semua data salinan C hasil telah diterima," ungkap Nasir.

Pada Tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan dengan alat bantu SIREKAP Web, yang memungkinkan sinkronisasi data secara cepat dan efisien sebelum dilanjutkan ke tingkat kabupaten dan provinsi.

Nasir menjelaskan bahwa kini SIREKAP telah terkoneksi dengan aplikasi data pemilih dan dilengkapi fitur 20 Guard Arimatika untuk memastikan validitas dan ketertutupan angka.

Apabila angka yang diinput tidak sesuai, sistem akan memberikan peringatan untuk memperbaiki, jelasnya. Selain itu, teknologi OMR (Optical Mark Recognition) dan OCR (Optical Character Recognition) yang digunakan memiliki akurasi tinggi sehingga tidak perlu repot melakukan entry, PPK hanya perlu mencermati data dari TPS berdasarkan Form C Hasil.

Tahapan Rekapitulasi tingkat kecamatan oleh PPK di Kabupaten Sidoarjo telah selesai sebelum batas

akhir tanggal 3 Desember 2024. " Masyarakat dapat mengakses salinan C Hasil di tingkat TPS serta D Hasil di tingkat kecamatan, Nantinya juga hasil rekap tingkat kabupaten, dan provinsi melalui situs web resmi pilkada2024.kpu.go.id," tegas Nasir.

Pilkada serentak 2024 yang melibatkan partisipasi luas masyarakat bertujuan memilih kepala daerah untuk masa jabatan lima tahun ke depan. Dengan dukungan teknologi seperti SIREKAP, diharapkan seluruh proses pemilu berjalan lancar, hasil diumumkan tepat waktu, dan tetap mengutamakan prinsip transparansi serta keadilan.

Langkah KPU Kabupaten Sidoarjo ini sejalan dengan kebijakan KPU RI dalam memberikan informasi kepada publik tentang hasil pilkada dengan cepat dan akurat. Penguasaan SIREKAP telah ditetapkan oleh KPU RI melalui Surat Keputusan Nomor 1591 Tahun 2024 sebagai aplikasi khusus untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. • Loe

## Bahas UMK, Disnaker Tunggu Juknis dari Kementerian

SIDOARJO - Pembahasan upah minimum kabupaten (UMK) Sidoarjo hingga kini belum dilakukan. Pemkab masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025 naik maksimal sebesar 6,5 persen. Untuk UMK, akan ada pembahasan tersendiri. "Sampai saat ini kami masih menunggu juknis dari kementerian tentang rumusan UMK," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo Ainun Amalia kemarin (4/12). Informasinya, juknis bakal ke-



luar dalam satu dua hari ini. Setelah juknis dan surat resmi diterima Pemkab Sidoarjo, pihaknya akan langsung membahas bersama dewan pengu-pahan. "Baru bisa pembahasan setelah juknisnya keluar," katanya. Sebelum akhir Desember,

pembahasan harus tuntas dan disampaikan ke Pemprov Jatim untuk ditetapkan. Sebab, tahun depan sudah mulai dilaksanakan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sidoarjo Sukiyanto mengatakan bahwa pengusaha bakal mengikuti aturan yang berlaku. "Kami tidak ada keinginan ingin berapa atau berapa. Prinsipnya, kalau sesuai aturan yang ditetapkan, kami laksanakan," katanya.

Apalagi, mekanismenya bakal dilakukan bersama, baik dari pengusaha, Pemkab Sidoarjo maupun serikat buruh/pekerja. "Secara teknis belum dihitung. Tapi, nanti di juknis pasti ada rumusnya. Ting-

gal dimasukkan. Misalnya, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lainnya," paparnya.

Biasanya, sebelum 1 Desember sudah ada penetapan tentang UMK. Namun, untuk 2025 berbeda karena ada putusan baru dari Mahkamah Konstitusi. "Tapi, saya kira tidak butuh waktu lama pembahasannya kalau sudah ada rumusnya nanti," ujarnya.

Pihak serikat pekerja juga masih menunggu pembahasan UMK. "Untuk saat ini kami menunggu permenaker soal UMK tersebut," ujar Ketua Sarekat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Sidoarjo Ahmad Yani. (uzzi/fal)

## Rumah Potong Hewan Pemkab Sidoarjo Ditutup

Sidoarjo, Bhirawa Pejabat pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo harus segera mencari solusi secepatnya. Supaya rumah potong hewan (RPH) Krian milik Pemkab Sidoarjo tersebut, bisa beroperasi kembali. Ini sangat mengejutkan, sebab ternyata diam-diam, sudah ada sekitar 6 bulan ini RPH tersebut ditutup. Alasan pejabat Dinas Pangan Sidoarjo, RPH Krian tersebut tidak mampu lagi memotong daging sapi lagi dalam setiap harinya. Karena pemilik sapi lebih memilih RPH liar di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya.

"Banyak pemilik sapi yang memilih membawa sapi ke RPH liar, padahal sapi-sapi itu dipotong dengan tidak masuk kriteria sehat dan halal," ucap Kepala Bidang Produksi Peternakan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo drh Toni Hartono, usai memberikan sosialisasi bahaya konsumsi sapi gelohggongan, Selasa (3/12/2024) kemarin, di Fave Hotel Sidoarjo. Kriteria tidak sehat itu, menurut drh Toni, diantaranya, sapi yang akan dipotong digelohggong dengan air. Sementara, kriteria tidak halal, sapi yang dipotong masih ada sapi betina yang masih dalam kondisi produktif.

Padahal, lanjut drh Tony, sesuai peraturan yang berlaku, sapi yang akan dipotong tidak boleh digelohggong air. Cara seperti itu tidak sehat. Demikian juga, sapi betina yang masih produktif, tidak boleh untuk dipotong. Alasan lain, akan bisa memutus mata rantai perkebngbiakan ternak sapi.

"Cara-cara seperti itu jelas merugikan masyarakat sebagai konsumen daging sapi," katanya. Menurut drh Tony pihaknya tidak kurang-kurang dalam melakukan sosialisasi dan melakukan Sidak. Namun, para pelaku di RPH liar di

wilayah Sidoarjo dan sekitarnya tidak juga jera. Karena itu, pihaknya menyerafkan keputusan yang terbaik kepada pelaku aparat penegak hukum (APH), supaya para pelaku bisa jera.

"Di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya banyak RPH liar," kata Tony, tidak menyebut tempatnya dimana saja. Disampaikan Tony, RPH Krian milik Pemkab Sidoarjo itu adalah RPH yang prosesnya masuk dalam kriteria kesehatan juga prosesnya masuk dalam kriteria halal. RPH ini dalam sehari mampu menyembelih sampai 50 ekor sapi. Sapi yang disembelih selain dari Sidoarjo juga dari luar daerah. [kus.dre]

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



CakraJatim.com



Home > Uncategorized

## Usman Lapor Badan Kehormatan DPRD Sidoarjo



by **cakrajatim**

— 4 Desember 2024



0

SHARES



**Cakra jatim.com – Sidoarjo:** Anggota Banggar dari fraksi PKB, H. Usman, mendatangi kantor BK (Badan Kehormatan) DPRD untuk menyerahkan dokumen dugaan kesalahan mekanisme dalam proses persetujuan RAPBD Sidoarjo 2025.

pembahasan terakhir menjelang pembahasan terakhir APBD 2025, Sabtu (30/11) lalu.

RELATED POSTS

➔CakraJatim.com



➔CakraJatim.com



Ketua BK, Emir Firdaus, ditemui Rabu (4/12) siang, mengakui telah menerima berkas laporan pak Usman. Ia belum membuka berkas yang tersimpan dalam amplop besar berwarna coklat. Berkas itu nanti dibuka bersama 4 anggota BK lain untuk dikaji bersama-sama. Ia berjanji dalam 2 atau 3 hari lagi akan mengadakan rapat BK untuk mensikapi laporan ini.

Emir menegaskan poinnya adalah soal penghapusan dana hibah Muslimat, Fatayat dan Aisyiah. “Saya tidak tahu siapa saja penerima dana hibah yang dihapuskan. Setahun saya baru 3 Ormas. Mungkin ada Ormas lain yang juga dihapus setelah saya nanti buka dokumen laporan pak Usman, ” Tandasnya.

Poin dari laporan ini, menurut Emir, terkait mekanisme dalam proses persetujuan APBD, yang tidak melibatkan Banggar DPRD dalam penghapusan hibah Ormas.

“Saya sebagai anggota Banggar DPRD tidak tahu

tentang penghapusan, padahal alokasi dana hibah sudah dicantumkan di KUA-PPAS dan plavon anggaran, ” tandasnya.

Karena Banggar belum sepakat dengan penghapusan hibah itu, pimpinan lalu menarik seluruh fraksi untuk dimintai persetujuan.

---

➤ **CakraJatim.com**



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



CakraJatim.com



Usman yang ditemui terpisah, menyatakan, mekanisme rapat pimpinan dengan fraksi untuk membahas penghapusan hibah ini tidak sesuai PP 12/2018 dan Tatib DPRD. Karena fraksi bukan alat kelengkapan dewan. “Kita punya Banggar, kenapa mengajak fraksi, ” Terangnya.

Dari informasi yang diperoleh, dana hibah yang dihapus dari Ormas, dialihkan untuk kepentingan OPD. “Padahal dana hibah ini tidak melanggar aturan, dari tahun ke tahun APBD sudah digunakan untuk dana hibah Muslimat dan aisyiah, kenapa baru sekarang dimasalahkan.

Anggota Banggar dari PAN, Bangun Winarso, membenarkan bahwa hibah itu sudah masuk KUA-PPAS, untuk Muslimat Rp 6 miliar, Aisyiah Rp 4 miliar dan Fatayat Rp 4 miliar. Tapi Tim Anggaran Pemkab tidak mau memasukkan dana hibah dalam APBD. Kecuali bila dana itu untuk biaya kegiatan.

“Kami tidak pernah menolak pemberian hibah, justru

Tim anggaran Pemkab yang menolak setelah dapat  
Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo  
masukan petinggi aparat hukum Di Sidoarjo, ”

Ujarnya.

Bila penghapusan ini digunakan untuk kegiatan OPD, itu akan menyulitkan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah. “Itu nanti membuat repot OPD, ” ucap Bangun. (hd)

➔ [CakraJatim.com](https://www.cakrajatim.com)

# Penghapusan Dana Hibah Bagi Tiga Ormas Diduga Cacat Prosedur.H Usman Laporkan Ke BK

dimensin | 04 Desember 2024, 10:01 am | 0 comments | 96 views





Anggota DPRD Sidoarjo dari F\_PKB H.Usman M Kes saat menyerahkan sejumlah dokumen terkait hasil keputusan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo kepada Ketua BK Dr H Emir Firdaus ST MM.

Bangun Winarso, Anggota DPRD dari PAN yang juga salah Satu Anggota Banggar.

DIMENSINEWS COM SIDOARJO; Khabar tentang dihapusnya plafon anggaran/dana hibah bagi tiga organisasi masyarakat (Ormas)

 Top





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Search



besar,antara,anya,Muslimat,Fatayat serta Aisiyah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 depan sebagaimana telah disahkan dalam Sidang Paripurna lembaga Legislatif-Eksekutif yang berlangsung pada Hari Sabtu (30/11) lalu memantik reaksi keras dari sejumlah kalangan.

Respon keras salah satu diantaranya dilontarkan oleh oleh anggota DPRD dari F\_PKB H Usman M Kes. Legislator yang juga mantan Ketua DPRD Sidoarjo periode 2019-2024 itu,Rabu (4/12) siang tadi langsung mendatangi ruang sekretariat Badan Kehormatan (Badan Kehormatan) lantai 2 kantor DPRD.

Kedatangan politisi kawakan PKB itu selain bermaksud menemui secara langsung Ketua BK DR Emir Firdaus ST MM,juga sekaligus menyerahkan sejumlah dokumen terkait adanya dugaan kesalahan mekanisme dalam proses persetujuan RAPBD Sidoarjo 2025 dalam Sidang Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD,Abdillah Nasih beserta sejumlah unsur pimpinan dewan dewan lain dan jajaran pejabat eksekutif.

Kepada sejumlah awak media,H Usman menjelaskan dugaan kesalahan itu ditemukannya terkait mekanisme perubahan alokasi anggaran hibah bagi tiga ormas besar itu saat pembahasan terakhir

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo  
menjelang pembahasan terakhir APBD 2025, Sabtu  
(30/11) lalu

(30/11) lalu.

“Prinsipnya perubahan alokasi dana hibah tersebut menyalahi prosedur dan mekanisme dengan atau tanpa sengaja tidak melibatkan Badan Anggaran (Banggar). Padahal post anggaran untuk dana hibah itu sudah tercantum dalam Kebijakan Umum

^  
Top



Search



besar, antara lain, Muslimat, Fatayat serta Aisiyah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 depan sebagaimana telah disahkan dalam Sidang Paripurna lembaga Legislatif-Eksekutif yang berlangsung pada Hari Sabtu (30/11) lalu memantik reaksi keras dari sejumlah kalangan.

Respon keras salah satu diantaranya dilontarkan oleh oleh anggota DPRD dari F\_PKB H Usman M Kes. Legislator yang juga mantan Ketua DPRD Sidoarjo periode 2019-2024 itu, Rabu (4/12) siang tadi langsung mendatangi ruang sekretariat Badan Kehormatan (Badan Kehormatan) lantai 2 kantor DPRD.

Kedatangan politisi kawakan PKB itu selain bermaksud menemui secara langsung Ketua BK DR Emir Firdaus ST MM, juga sekaligus menyerahkan sejumlah dokumen terkait adanya dugaan kesalahan mekanisme dalam proses persetujuan RAPBD Sidoarjo 2025 dalam Sidang Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Abdillah Nasih beserta sejumlah unsur pimpinan dewan dewan lain dan jajaran pejabat eksekutif.

Kepada sejumlah awak media, H Usman menjelaskan dugaan kesalahan itu ditemukannya terkait mekanisme perubahan alokasi anggaran hibah bagi

tiga ormas besar itu saat pembahasan terakhir menjelang pembahasan terakhir APBD 2025, Sabtu (30/11) lalu.

“Prinsipnya perubahan alokasi dana hibah tersebut menyalahi prosedur dan mekanisme dengan atau tanpa sengaja tidak melibatkan Badan Anggaran (Banggar). Padahal post anggaran untuk dana hibah itu sudah tercantum dalam Kebijakan Umum

 Top





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Search



(Banggar).Padahal post anggaran untuk dana hibah itu sudah tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-PPAS” ujar Aba Usman, sebutan akrab politisi yang dikenal akrab dengan wartawan ini. Ditemui diruang sekretariat Badan Kehormatan, Ketua BK, Emir Firdaus, membenarkan telah menerima berkas laporan dari H Usman. Namun ia belum mengetahui secara pasti apa saja isi dokumen-dokumen yang terbungkus dalam amplop besar berwarna coklat.

“Berkas ini nanti baru akan kita buka bersama dengan 4 anggota BK lain untuk dikaji bersama-sama Mas” ujar Emir

Ia berjanji dalam 2 atau 3 hari lagi akan mengadakan rapat BK untuk menyikapi laporan ini.

Secara umum, Emir menuturkan bahwa poin dalam isi dokumen yang diserahkan H Usman adalah soal penghapusan dana hibah Muslimat, Fatayat dan Aisyiah.

“Saya tidak tahu siapa saja penerima dana hibah yang dihapuskan. Setahun saya baru 3 Ormas. Mungkin ada Ormas lain yang juga dihapus setelah saya nanti buka dokumen laporan pak Usman, ” Tandasnya.

Poin dari laporan ini, menurut Emir, terkait mekanisme dalam proses persetujuan APBD, yang tidak melibatkan Banggar DPRD dalam penghapusan

tentang penghapusan, padahal alokasi dana hibah sudah dicantumkan di KUA-PPAS dan plafon anggaran," tandasnya.

Karena Banggar belum sepakat dengan penghapusan hibah itu, pimpinan lalu menarik



# SIREKAP Permudah Proses Rekapitulasi Suara

**SIDOARJO** - Jadwal Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pilkada 2024 tingkat Kabupaten Sidoarjo direncanakan besok Kamis, (5/12/24). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo kembali akan menggunakan aplikasi SIREKAP sebagai alat bantu rekapitulasi suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Aplikasi SIREKAP terdiri dari dua platform utama, yaitu SIREKAP Mobile berbasis Android dan SIREKAP Web. SIREKAP Mobile digunakan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memotret formulir C.

Hasil dan mengirimkan data tersebut ke server setelah divalidasi. Data yang terkumpul dari setiap TPS kemudian diproses lebih lanjut menggunakan SIREKAP Web oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, hingga KPU Provinsi untuk rekapitulasi di masing-masing tingkatan.

"Penggunaan SIREKAP sebagai alat bantu rekapitulasi suara membuat proses rekapitulasi berjalan cepat," ujar Natsiruddin Yahya, Komisioner KPU Kabupaten Sidoarjo Divisi Data dan Informasi, kepada Duta Masyarakat, Rabu (4/12/24).

"Pembaruan versi SIREKAP meningkatkan akurasi data dan mengurangi potensi kesalahan pada pencatatan manual," tambahnya.

Masih kata Natsiruddin Yahya, menambahkan, implementasi SIREKAP Mobile dimulai di TPS, di mana petugas KPPS memfoto hasil penghitungan suara C Hasil menggunakan aplikasi sirekap, sehingga dapat tampil dalam sirekap web yang di monitoring langsung secara berjenjang oleh PPK, KPU Kabupaten, hingga KPU RI.

"Alhamdulillah Aplikasi sirekap saat pilkada ini berjalan lancar, Proses unggah data dari sirekap



Komisioner KPU Sidoarjo Muhammad Natsiruddin Yahya, (FT/LOETFI)

mobile tidak sampai 24 jam, semua data salinan C hasil telah diterima," ungkap Nasir

Pada Tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan dengan alat bantu SIREKAP Web, yang memungkinkan sinkronisasi data secara cepat dan efisien sebelum dilanjutkan ke tingkat kabupaten dan provinsi.

Nasir menjelaskan bahwa kini SIREKAP telah terkoneksi dengan aplikasi data pemilih dan dilengkapi fitur 20 Guard Aritmatika untuk memastikan validitas dan keterhubungan angka.

Apabila angka yang diinput tidak sesuai, sistem akan memberikan peringatan untuk memperbaiki," jelasnya. Selain itu, teknologi OMR (Optical Mark Recognition) dan OCR (Optical Character Recognition) yang digunakan memiliki akurasi tinggi, sehingga tidak perlu repot melakukan entry, PPK hanya perlu mencermati data dari TPS berdasarkan Form C Hasil.

Tahapan Rekapitulasi tingkat kecamatan oleh PPK di Kabupaten Sidoarjo telah selesai sebelum batas

akhir tanggal 3 Desember 2024. "Masyarakat dapat mengakses salinan C Hasil di tingkat TPS serta D Hasil di tingkat kecamatan, Nantinya juga hasil rekap tingkat kabupaten, dan provinsi melalui situs web resmi [pilkada2024.kpu.go.id](http://pilkada2024.kpu.go.id)," tegas Nasir.

Pilkada serentak 2024 yang melibatkan partisipasi luas masyarakat bertujuan memilih kepala daerah untuk masa jabatan lima tahun ke depan. Dengan dukungan teknologi seperti SIREKAP, diharapkan seluruh proses pemilu berjalan lancar, hasil diumumkan tepat waktu, dan tetap mengutamakan prinsip transparansi serta keadilan.

Langkah KPU Kabupaten Sidoarjo ini sejalan dengan kebijakan KPU RI dalam memberikan informasi kepada publik tentang hasil pilkada dengan cepat dan akurat. Penggunaan SIREKAP telah ditetapkan oleh KPU RI melalui Surat Keputusan Nomor 1591 Tahun 2024 sebagai aplikasi khusus untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. • Loe



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Rumah Potong Hewan Pemkab Sidoarjo Ditutup

Sidoarjo, Bhirawa

Pejabat pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo harus segera mencari solusi secepatnya. Supaya rumah potong hewan (RPH) Krian milik Pemkab Sidoarjo tersebut, bisa beroperasi kembali. Ini sangat mengejutkan, sebab ternyata diam-diam, sudah ada sekitar 6 bulan ini RPH tersebut ditutup.

Alasan pejabat Dinas Pangan Sidoarjo, RPH Krian tersebut tidak mampu lagi memotong daging sapi lagi dalam setiap harinya. Karena pemilik sapi lebih memilih RPH liar di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya.

"Banyak pemilik sapi yang memilih membawa sapi ke RPH liar, padahal sapi-sapi itu dipotong dengan tidak masuk kriteria sehat dan halal," ucap Kepala Bidang Produksi Peternakan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo drh Toni Hartono, usai memberikan sosialisasi bahaya konsumsi sapi gelonggongan, Selasa (3/12/2024) kemarin, di Fave Hotel Sidoarjo.

Kriteria tidak sehat itu, menurut drh Toni, diantaranya, sapi yang akan dipotong digelombang dengan air. Sementara, kriteria tidak halal, sapi yang dipotong masih ada sapi betina yang masih dalam kondisi produktif.

Padahal, lanjut drh Tony, sesuai peraturan yang berlaku, sapi yang akan dipotong tidak boleh digelombang air. Cara seperti itu tidak sehat. Demikian juga, sapi betina yang masih produktif, tidak boleh untuk dipotong. Alasan lain, akan bisa memutus mata rantai perkembangbiakan ternak sapi.

"Cara-cara seperti itu jelas merugikan masyarakat sebagai konsumen daging sapi," katanya.

Menurut drh Tony pihaknya tidak kurang-kurang dalam melakukan sosialisasi dan melakukan Sidak. Namun, para pelaku di RPH liar di

wilayah Sidoarjo dan sekitarnya tidak juga jera. Karena itu, pihaknya menyerahkan keputusan yang terbaik kepada pelaku aparat penegak hukum (APH), supaya para pelaku bisa jera.

"Di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya banyak RPH liar," kata Tony, tidak menyebut tempatnya dimana saja.

Disampaikan Tony, RPH Krian milik Pemkab Sidoarjo itu adalah RPH yang prosesnya masuk dalam kriteria kesehatan juga prosesnya masuk dalam kriteria halal. RPH ini dalam sehari mampu menyembelih sampai 50 ekor sapi. Sapi yang disembelih selain dari Sidoarjo juga dari luar daerah. [kus.dre]

HARIAN  
**Bhirawa**

## Bahas UMK, Disnaker Tunggu Juknis dari Kementerian

**SIDOARJO** - Pembahasan upah minimum kabupaten (UMK) Sidoarjo hingga kini belum dilakukan. Pemkab masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025 naik maksimal sebesar 6,5 persen. Untuk UMK, akan ada pembahasan tersendiri. "Sampai saat ini kami masih menunggu rumusan UMK," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo Ainun Amalia kemarin (4/12). Informasinya, juknis bakal ke-



luar dalam satu dua hari ini. Setelah juknis dan surat resmi diterima Pemkab Sidoarjo, pihaknya akan langsung membahas bersama dewan pengupahan. "Baru bisa pembahasan setelah juknisnya keluar," katanya. Sebelum akhir Desember,

pembahasan harus tuntas dan disampaikan ke Pemprov Jatim untuk ditetapkan. Sebab, tahun depan sudah mulai dilaksanakan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sidoarjo Sukiyanto mengatakan bahwa pengusaha bakal mengikuti aturan yang berlaku. "Kami tidak ada keinginan ingin berapa atau berapa. Prinsipnya, kalau sesuai aturan yang ditetapkan, kami laksanakan," katanya.

Apalagi, mekanismenya bakal dilakukan bersama, baik dari pengusaha, Pemkab Sidoarjo maupun serikat buruh/pekerja. "Secara teknis belum dihitung. Tapi, nanti di juknis pasti ada rumusnya. Ting-

gal dimasukkan. Misalnya, pertimbangan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lainnya," paparnya.

Biasanya, sebelum 1 Desember sudah ada penetapan tentang UMK. Namun, untuk 2025 berbeda karena ada putusan baru dari Mahkamah Konstitusi. "Tapi, saya kira tidak butuh waktu lama pembahasannya kalau sudah ada rumusnya nanti," ujarnya.

Pihak serikat pekerja juga masih menunggu pembahasan UMK. "Untuk saat ini kami menunggu permenaker soal UMK tersebut," ujar Ketua Sarekat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Sidoarjo Ahmad Yani. (uzi/fal)

# Jawa Pos



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## PILKADA

# Hari Ini Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten

**SIDOARJO** – Rekapitulasi suara pemilihan bupati Sidoarjo di tingkat kabupaten dimulai hari ini (5/12) pukul 10.00 di kantor KPU Sidoarjo. Bawaslu Sidoarjo mengingatkan proses rekapitulasi dilakukan secara berurutan sesuai prosedur.

Bawaslu menekankan pentingnya pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum 2024 sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2024. Dengan demikian, prosesnya bisa berlangsung transparan, akuntabel, dan meminimalkan potensi pelanggaran.

Komisioner Bawaslu Sidoarjo Agisma Dyah Fastari mengatakan, pihaknya sudah melayangkan imbauan resmi. Ada arahan terperinci, mulai proses persiapan hingga pelaksanaan rekapitulasi. "Sehingga ada persiapan matang dan pelaksanaannya berlangsung sesuai aturan yang berlaku," kata Agis.

Di antaranya, Bawaslu meminta rapat pleno rekapitulasi digelar sesuai jadwal. Proses rekapitulasi dilakukan secara berurutan sesuai prosedur agar setiap tahapan dapat diawasi dengan baik. Misalnya, tahapan pembacaan dan pencocokan data oleh PPK, pencatatan kejadian khusus, dan lainnya.

Komisioner KPU Sidoarjo Haidar Munjid mengatakan, hingga kemarin, persiapan rekapitulasi terus dilakukan. Undangan ke pihak terkait sudah dikirimkan. "Hari ini (kemarin, Red) kami juga koordinasi dengan Bawaslu," jelasnya. (uzi/fal)

## Kejari Musnahkan 1,75 Kg Sabu-Sabu hingga Ratusan Ribu Rokok Ilegal

Barang Bukti dari  
178 Perkara yang Inkracht

**SIDOARJO** - Barang bukti narkotika, senjata tajam, minuman keras, hingga rokok ilegal dimusnahkan di halaman kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo kemarin (4/12). Itu merupakan tindak lanjut dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

"Ini semua barang bukti dari 178 perkara yang *inkracht* dalam periode Juli hingga Desember 2024," jelas Kepala Kejari Sidoarjo Roy Rovalino Herudiansyah. Langkah itu merupakan bentuk tanggung jawab institusinya dalam menyelesaikan penanganan perkara pidana secara tuntas. "Ini dilakukan untuk memastikan barang bukti tidak disalahgunakan dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana," sambungnya.



**KASUS TUNTAS:** Barang bukti senjata tajam dimusnahkan dengan cara digerinda di kantor Kejari Sidoarjo kemarin (4/12).

Roy mengungkapkan, barang bukti narkotika yang dimusnahkan berupa sabu-sabu seberat 1,75 kilogram dan ganja sebanyak 5.010 gram. "Juga ada pil LL dengan jumlah 452.409 butir serta pil ekstasi 80 butir," bebarnya.

Selain itu, ada 13 buah sajam yang berasal dari perkara gangster, 155 botol minuman keras, dan 932.800 rokok tanpa cukai atau ilegal. "Sisanya HP yang digunakan dalam perkara se-

jumlah 45 buah," kata Roy.

Pemusnahan dimulai dengan merusak HP dengan cara dipalu. Dilanjutkan dengan memusnahkan beragam jenis narkoba dengan cara digiling menggunakan blender. "Untuk sajam tadi digerinda satu per satu," jelasnya. Pemusnahan dilanjutkan dengan membakar ratusan ribu rokok dan minuman beralkohol ilegal.

Roy mengatakan, pemusnahan tersebut juga untuk mengurangi

tumpukan barang bukti di kantor Kejari. Sebab, ruang penyimpanan barang bukti terbatas. "Kami berharap tidak ada lagi tunggakan penyelesaian perkara di tahun ini," tegasnya.

Selain Kajari, pemusnahan barang bukti tersebut turut dihadiri pihak Pemkab Sidoarjo, Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing, hingga Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo. (eza/fal)



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



PERHATIAN: Pj Kepala Desa Bluru Kidul, Dharma Putro Prakoso saat melihat batik sesuai kegiatan peluncuran.

M. SAIFUL ROHMAN/RADAR SIDOARJO

## Promosikan Produk Lokal, Pemdes Bluru Kidul Luncurkan Galeri UMKM

KOTA-Untuk mendukung produk lokal, Pemerintah Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo resmi meluncurkan Galeri UMKM Bersama di Jalan Balai Desa no 1, Bluru Kidul. Galeri tersebut akan menjadi wadah bagi produk makanan, fashion hingga kerajinan tangan dari pelaku UMKM.

Pj Kepala Desa Bluru Kidul, Dharma Putro Prakoso mengatakan, galeri tersebut merupakan inisiatif dari Paguyuban UMKM Bluru Bangkit. Menurutnya, galeri akan

dapat digunakan untuk memamerkan produk asli Desa Bluru Kidul.

"Galeri ini bukan hanya sebagai tempat pameran produk, tetapi juga sebagai usaha bersama untuk mengembangkan UMKM di desa, semua produk yang dipamerkan adalah hasil produksi dari Bluru Kidul," ucapnya saat ditemui di lokasi, Rabu (4/12).

Tidak hanya menyediakan tempat, Pemdes Bluru Kidul juga memberikan pelatihan

● Ke Halaman 10



### Promosikan Produk Lokal,...

kepada pelaku UMKM. Seperti dalam hal mengoptimalkan digital marketing. "Pelatihan mencakup cara-cara pemasaran melalui media sosial dan platform digital lainnya, agar produk

UMKM Bluru Kidul tidak hanya dipasarkan secara offline, tetapi juga secara online," jelasnya.

Dharma berharap, dengan adanya galeri UMKM, pelaku UMKM Bluru Kidul bisa lebih kreatif dan bersemangat untuk meningkatkan kualitas

produk mereka.

"Promosi produk secara online diharapkan dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal di tingkat yang lebih tinggi," katanya.

Ketua UMKM Bluru Bangkit, Eti Sofiaty menyambut baik dibukanya

tempat bagi pengusaha lokal. Dia bersyukur karena galeri menjadi tempat yang bisa menampung seluruh produk lokal Bluru Kidul.

Sofiaty berharap, dengan adanya galeri itu, UMKM Bluru Bangkit dapat berkembang pesat dan menjadi lebih maju.

Dia optimistis, para pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas produk.

"Kami berharap, galeri UMKM Bersama akan menjadi motor penggerak bagi kemajuan UMKM Bluru Kidul yang semakin berkembang dan melesat," pungkasnya. (sai/vga)



## Perkuat Layanan Kesehatan, Tambah Posyandu Keluarga

KOTA—Untuk memperkuat akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo terus mendorong pengembangan Integrasi Layanan Primer (ILP). Yakni dengan menargetkan penambahan puskesmas pembantu (Pustu) di berbagai wilayah.

Hal tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat dasar. Seperti Posyandu hingga Fasilitas Kesehatan (Faskes) tingkat lanjut.

Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Sidoarjo, Inensa Khoiril Harahap mengatakan, penambahan pustu

nantinya akan dilakukan oleh tiap puskesmas.

"Jadi setiap puskesmas, tahun depan akan ditargetkan menambah dua pustu di wilayahnya," ucapnya kepada Radar Sidoarjo, Rabu (4/12).

Penambahan pustu dinilai sebagai langkah strategis dalam memperluas akses layanan kesehatan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kemudahan layanan bagi masyarakat.

"Pustu akan membawahi satu posyandu, kemudian nantinya posyandu tersebut akan diubah menjadi posyandu keluarga, jadi di posyandu nanti bukan hanya bayi dan balita, tapi melain-

yani juga remaja, dewasa, hingga lansia," jelasnya.

Dengan terintegrasinya posyandu keluarga dengan pustu, proses pengobatan di puskesmas akan menjadi lebih mudah. Hal itu karena riwayat kesehatan, seperti berat badan dan keluhan penyakit sebelumnya sudah tercatat oleh posyandu keluarga.

Inensa mengungkapkan, terdapat 1.852 unit posyandu di Kota Delta. Dari jumlah tersebut, 464 posyandu di antaranya telah terintegrasi dengan program ILP sebagai posyandu keluarga.

"Untuk tahun depan dinkes menargetkan adanya tambahan 352 posyandu keluarga, sehingga jumlahnya menjadi 816 posyandu



SEHAT: Posyandu keluarga yang dilakukan Dinkes Sidoarjo

keluarga," terangnya.

Baginya, pengembangan posyandu keluarga berbasis ILP sangat penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Supaya kualitas layanan kesehatan semakin merata di setiap lapisan.

"Dengan dukungan pustu dan posyandu keluarga, kami berharap kualitas layanan kesehatan di tingkat

desa semakin meningkat," ujarnya.

"Program ini tidak hanya memperkuat layanan kesehatan bagi ibu dan anak, tetapi juga menjangkau seluruh anggota keluarga, sehingga posyandu keluarga bisa menjadi layanan kesehatan preventif dan promotif yang terhubung dengan faskes di atasnya atau puskesmas," pungkasnya. (sai/vga)



Home > Ekonomi & Bisnis

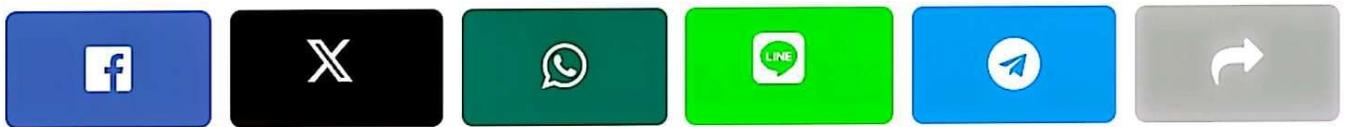
## BPR Delta Artha Sidoarjo Siapkan Rp5 M untuk Program KUR Bunga 0,2% Per-tahun di 2025

Rabu, 4 Desember 2024 | 21:22





Dirut BPR Delta Artha Sofia Nurkrisnajati Atmaja, saat menghadiri acara sosialisasi lomba tingkat RT awal tahun 2024 lalu/Foto: Istimewa



-47%

Vention Docking Station Specifications Table

Variants	Interface	HDMI	VGA	Displayport	RJ45	Ports				
						USB	SD/TF 3.5mm	Power Input	Power for Dock	
THD	USB-C Male	4K@30Hz	1080P@60Hz	-	1 Gbps	USB 3.0 x 3	256G	TRRS	PD 100W	-
TPJ	USB-C Female	4K@30Hz	1080P@60Hz	-	1 Gbps	USB 3.1 Gen 2 x 1	256G	TRRS	PD 100W	DC 5V

KOMPOSISI

<b>PROCESSOR</b>	I5 12400F
<b>MAINBOARD</b>	ASROCK B660M PRO RS
<b>RAM</b>	TEAM DELTA 8GBX2 DDR4 3200 PUTIH RGB
<b>HARDISK</b>	INTERNAL PC SEAGATE BARACUDA 3.5 INCH 1TB



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Dalam upaya membantu permodalan pelaku usaha di Sidoarjo, BPR Delta Artha mengalokasikan anggaran Rp 2,5 Miliar sampai dengan Rp 5 Miliar.

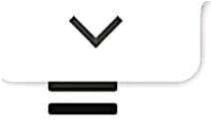
**Baca Juga : [Sweet Like Strawberry, Minuman Menyegarkan Suasana Hati Ala Favehotel Sidoarjo](#)**

Dirut BPR Delta Artha, Sofia menjelaskan, warga Sidoarjo yang ingin mendapat bantuan tersebut diharuskan mempunyai usaha terlebih dahulu. Karena program dagulir bunga 0,2% ini merupakan Kredit Usaha Rakyat (KUR).





"Yang bisa mengajukan pinjaman permodalan  
bunga 0,2% harus ada usahanya terlebih dahulu"



bunga 0,2% harus ada usahanya terlebih dahulu,  
karena memang Kredit Usaha Rakyat," ungkapnya.

Sementara, dalam beberapa kali kesempatan, Plt.  
Bupati Sidoarjo, Subandi, memahami kondisi  
masyarakat Kota Delta yang banyak kesulitan  
modal dalam mengembangkan usahanya.

"Bantuan dana bergulir ini kami persiapkan untuk  
membantu para pengusaha kecil, program ini akan  
dimulai pada awal 2025," ungkapnya.

Subandi juga bakal memberikan pendampingan  
kepada pelaku UMKM Kota Delta, apa saja? Ya,  
mulai dari produksi hingga marketing. Subandi  
ingin pelaku usaha di Sidoarjo bisa Go  
Internasional.

**Baca Juga :** [Penerimaan Cukai Hasil](#)

# Tembakau Tahun 2022 di Sidoarjo Naik 16

## Persen

“Dalam waktu dekat kami akan memberikan pendampingan pelaku UMKM dan pelatihan penggunaan aplikasi berbasis digital,” pungkasnya.  
(ipung)



**sidoarjonews.id**

Berita Sidoarjo Terbaru Terkini

---

